

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan di pedesaan masih menjadi tantangan pembangunan nasional. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar dalam Tribunnars, 2016 menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,5 juta jiwa, dengan 17,9 juta jiwa diantaranya adalah masyarakat yang tinggal di desa. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah terbanyak masyarakat miskin di Indonesia tinggal di desa. Aspek ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pedesaan telah mengalami gangguan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat pedesaan dihadapkan pada penurunan populasi dan penuaan, pengangguran, terbatasnya akses terhadap layanan dasar, kurangnya transportasi umum dan perumahan yang terjangkau, serta biaya hidup dan kemiskinan yang tinggi (Steiner & Atterton, 2014; Steiner & Atterton, 2015). Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk dari kepedulian pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan karena pembangunan infrastruktur merupakan dasar untuk pertumbuhan ekonomi dan produktivitas (Oswald et al., 2011). Pembangunan infrastruktur juga mempunyai peranan penting dalam semua aspek pembangunan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma pembangunan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat bukanlah hal baru dalam kebijakan publik, penggunaan teknik 'pengembangan masyarakat' sejak abad kedelapan belas terus berlanjut untuk mempertahankan kontrol sosial (Somerville, 2011). Dua dekade terakhir, dapat dilihat minat dalam partisipasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pergeseran global menuju keterlibatan masyarakat dalam pembangunan terus dikembangkan (Nations, 2008). Secara berkelanjutan, penyediaan barang publik, layanan dan kesejahteraan, dan kebijakan yang muncul bertujuan untuk

menyerahkan otonomi dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut kepada masyarakat dan anggota masyarakat mereka (Moore & Mckee, 2014). Kebijakan yang muncul berupa program yang dimaksudkan untuk dipimpin dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat lokal agar memiliki kemampuan untuk berhasil merespons perubahan (Bradley, 2014; Herbert-cheshire, 2000; Barnes et al., 2007).

Berkaitan dengan hal tersebut, model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu konsep pembangunan yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat menggunakan metode yang terkait dengan pemberdayaan untuk melibatkan anggota masyarakat dalam menemukan solusi lokal terhadap masalah lokal yang mereka hadapi (Bradley, 2014; Moore & Mckee, 2014; Barnes et al., 2007). Melalui program pemberdayaan masyarakat, Negara dapat mengatur dan memobilisasi partisipasi aktif masyarakat (Cruikshank, 1999) karena partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat dengan menciptakan konstituen yang lebih kuat dan memberi lebih banyak akses ke sumber daya yang tersedia (Foster-fishman et al., 2009). Sejalan dengan hal tersebut, Narayanan et al. (2017) mengungkapkan bahwa inovasi untuk pendekatan yang memfasilitasi komunitas aktif partisipasi dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar antara masyarakat miskin. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur dasar di perdesaan menjadikan program pembangunan pemberdayaan berupa PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) sebagai salah satu solusi untuk pembangunan di perdesaan. Salah satu program PNPM Mandiri Perdesaan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Program tersebut merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar. PPIP menitikberatkan penanganan desa tertinggal yang memiliki pelayanan infrastruktur yang rendah. Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, dan kaum perempuan kepada pelayanan infrastruktur dasar permukiman perdesaan yang mendukung potensi desa dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan

masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi fokus utama program ini adalah : (i) pengembangan masyarakat; (ii) pembangunan/ peningkatan infrastruktur perdesaan; dan (iii) peningkatan peran *stakeholder* dan pemerintah daerah (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014).

Salah satu daerah yang mendapatkan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) adalah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Program ini telah dilaksanakan di Kabupaten Tegal sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan laporan hasil audit PIIP pada Kabupaten Tegal tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Jawa Tengah, tingkat keberhasilan PIIP dengan skor indikator utama kinerja adalah sebesar 70,24 dari skor maksimum 100,00 dan kurang dari ambang batas keberhasilan yang ditetapkan sebesar 85,00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan penyelenggaraan PIIP baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa dinilai cukup siap dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, capaian nilai indikator kinerja keandalan pelaporan hanya sebesar 30,93% atau memperoleh skor 6,19 dari bobot kinerja 20,00 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan PIIP tahun 2014 dan 2015 tidak berhasil disusun dan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berhasil atau tidaknya suatu program berbasis pemberdayaan masyarakat ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat karena program tersebut mengikutsertakan masyarakat setempat dalam setiap tahapnya, yakni sejak tahap perencanaan hingga tahap operasional dan pemeliharaan. Adisasmita (2006), mengemukakan bahwa dengan adanya partisipasi / keterlibatan langsung dari masyarakat penerima program pembangunan, maka hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Di negara berkembang, partisipasi masyarakat pada umumnya masih harus dimobilisasi melalui campur tangan pemerintah dalam mengupayakan kerjasama (Kusumatantya, 2013). Partisipasi masyarakat merupakan proses yang dapat meningkatkan komunikasi, interaksi dan pengambilan keputusan bersama antara pemangku kepentingan yang berbeda (Race & Millar, 2008). Dewasa ini, partisipasi dipandang sebagai 'hak' bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam

keputusan dan tindakan yang mempengaruhi mereka, namun jenis partisipasi perlu dipilih dengan hati-hati, karena tidak setiap jenis akan selalu sesuai. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemauan masyarakat untuk dilibatkan, lingkungan yang sangat mudah berubah, kurangnya keterampilan untuk memfasilitasi partisipasi atau konflik karena adanya harapan yang berbeda. Gyan & Ampomah (2016), mengemukakan bahwa konflik dan hubungan pemangku kepentingan, mempengaruhi keberhasilan program. Oleh karena itu, para pengelola program perlu memperhatikan hubungan antara pemangku kepentingan, karena konflik yang sering terjadi antar para pemangku kepentingan secara negatif mempengaruhi proyek pengembangan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, PPIP terus berupaya meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pelaksanaan program antara lain melalui peningkatan partisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program khususnya peran serta perempuan dan masyarakat kelompok miskin, terutama dalam proses pengambilan keputusan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014). Meskipun tujuan PPIP telah dinyatakan sebagaimana tersebut di atas, dalam pelaksanaan PPIP masih menghadapi berbagai masalah karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. Masalah-masalah tersebut antara lain fasilitator yang tidak memberdayakan masyarakat, tetapi secara langsung membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) ataupun menyusun pertanggungjawaban keuangan OMS dan memintakan kutipan kepada OMS atas jasanya; pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor) dan pungutan langsung ke kontraktor; pekerjaan pembangunan jalan dengan pekerjaan pengaspalan yang kurang melibatkan peran masyarakat; dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan (BPKP, 2015). Hal ini sebenarnya tidak akan terjadi jika seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dapat menjalankan perannya sesuai dengan yang sudah ter - *plotting* sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan kajian tentang proses pemberdayaan dan implementasi peran dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga bisa melahirkan rekomendasi demi memperbaiki tata kelola dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis

pemberdayaan masyarakat baik di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, maupun *stakeholder* terkait lainnya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Program pembangunan infrastruktur perdesaan (PIIP) merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi masalah ketersediaan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar. Program ini tahun 2014 -2015 didanai melalui dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dengan rincian alokasi dan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di tahun anggaran 2014 dilanjutkan pada tahun 2015 dengan alokasi dana Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Penyelenggara program adalah Tim Pelaksana yang dikoordinir oleh Tim Koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten.

Kabupaten Tegal mendapatkan 14 (empat belas) desa penerima program yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Kegiatan pembangunan infrastruktur dalam program ini direncanakan oleh masyarakat dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara swakelola dan tidak boleh dikontraktualkan. Hasil infrastruktur terbangun harus dipelihara sendiri oleh masyarakat melalui Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Model program partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat seperti ini, harapannya adalah dapat menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan pengelolaan yang lebih inklusif serta lebih besar ekuitas dalam pembagian keuntungan (Mansuri & Rao, 2013). Namun, mereka mengingatkan bahwa hasil partisipasi sangat bervariasi tergantung pada karakteristik masyarakat seperti ketidaksetaraan kekayaan, heterogenitas etnis, pengalaman manajemen dan peran institusi pusat. *Gender* juga dapat mempengaruhi hasil partisipatif. Partisipasi perempuan secara positif mempengaruhi keputusan, namun efektivitas partisipasi mereka dimediasi oleh atribut dan keterampilan individu, status sosio-ekonomi dan kemampuan lainnya (Agarwal, 2001, 2010).

Karakteristik masyarakat suatu daerah dengan daerah lain tidak sama tergantung dimana mereka tinggal dan seperti apa lingkungan sosial, ekonomi dan budayanya. Pada pelaksanaan program PPIP tahun 2014-2015 di Kabupaten Tegal, terdapat perbedaan keterlibatan masyarakat antara daerah pegunungan dan masyarakat daerah dataran rendah. Perbedaan partisipasi masyarakat diindikasikan dengan adanya perbedaan jumlah masyarakat yang ikut serta selama kegiatan berlangsung yaitu sejak proses perencanaan seperti sosialisasi dan rebug desa lainnya. Pada proses pelaksanaan kegiatan juga terdapat perbedaan bantuan yang diberikan baik berupa tenaga ataupun biaya. Berdasarkan data LMK (Laporan Manajemen Keuangan) Kabupaten untuk PPIP tahun 2014 dan 2015, nilai swadaya masyarakat antar desa penerima PPIP bervariasi dari nominal Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) hingga ada desa yang swadaya mencapai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam program ini tentu saja berpengaruh terhadap hasil pekerjaannya, baik dari segi kualitas pencapaian target, kualitas infrastruktur terbangun hingga ketepatan waktu pelaksanaannya.

Dalam kasus program PPIP di Kabupaten Tegal, partisipasi masyarakat desa di daerah pegunungan tampak lebih besar ketimbang partisipasi masyarakat di dataran rendah perkotaan. Sebagai kasus penelitian ini, Desa Dukuhbenda yang berada di daerah pegunungan mencatatkan nilai swadaya yang paling tinggi dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2014 dan Rp. 13.180.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pada tahun 2015. Dibandingkan dengan Desa Slawi Kulon yang terletak di daerah dataran rendah tepatnya di wilayah Kecamatan Slawi yang merupakan ibukota Kabupaten Tegal, nominal swadaya masyarakatnya hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun 2014 dan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015. Perbedaan besarnya swadaya masyarakat antar desa tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat di masing-masing desa.

Fenomena perbedaan partisipasi masyarakat di kedua desa tersebut yakni Desa Dukuhbenda yang terletak di pegunungan menunjukkan keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan Desa Slawi Kulon yang berada di

daerah perkotaan yang *notabene* status sosialnya lebih tinggi dari desa di pegunungan. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Brackertz & Meredyth (2009), bahwa keterlibatan dalam pengembangan masyarakat mungkin tidak merata, tergantung status sosialnya. Brackertz & Meredyth (2009), menyatakan bahwa status sosial yang lebih tinggi cenderung lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan. Namun secara umum harus diakui bahwa tingkat kemampuan, pemberdayaan dan kemauan untuk terlibat dalam inisiatif program pemerintah berbeda antar masyarakat satu dengan lainnya. Tentu saja untuk menghasilkan tata kelola masyarakat yang sukses memerlukan pengembangan sosial dan politik dengan cara yang berbeda (Somerville, 2005).

Hal lain yang menjadi catatan dalam pelaksanaan PPIP, ada beberapa desa penerima program yang pelaksanaan fisiknya oleh pihak ketiga (kontraktor). Tentu saja tujuan program untuk pelibatan peran serta masyarakat dalam hal ini tidak tercapai karena pelaksanaannya bukan oleh masyarakat itu sendiri. Kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan pun menjadi tidak sesuai yang dipersyaratkan. Selain itu rasa kepemilikan masyarakat akan hasil pembangunan tentu saja akan berkurang jika pekerjaan dikerjakan oleh pihak ketiga. Hal ini menyebabkan upaya pemeliharaan untuk pekerjaan yang dibangun tidak dapat optimal. Dari contoh permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PPIP tersebut di atas, dimungkinkan terjadi dikarenakan adanya disfungsi peran dari *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program. *Stakeholder* dalam PPIP berasal dari berbagai lapisan, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tim ahli/konsultan manajemen provinsi dan kabupaten, fasilitator masyarakat, pemerintah desa dan organisasi masyarakat setempat. Menurut Kusumatantya (2013), setiap pemangku kepentingan memiliki beragam kemungkinan untuk dapat melakukan disfungsi peran. Disfungsi peran tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan program, karena tanggung jawab masing-masing *stakeholder* yang terlibat secara langsung yang sudah terploting dalam program tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif atau permasalahan dalam pelaksanaan program.

Dari uraian tersebut, jika dikaitkan antara adanya fenomena perbedaan keterlibatan masyarakat antar desa dengan adanya permasalahan dalam

pelaksanaan program karena dimungkinkan adanya disfungsi peran *stakeholder* yang terlibat langsung dalam program, maka muncul suatu pertanyaan penelitian yaitu : “Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat pada program pembangunan infrastruktur perdesaan di Kabupaten Tegal, faktor apa saja yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat pada program tersebut?”

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji proses pemberdayaan masyarakat pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa dan Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

#### **1.3.2 Sasaran Penelitian**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi *stakeholder* dan perannya dalam kegiatan PPIP di Kabupaten Tegal.
2. Mengidentifikasi proses pemberdayaan dalam setiap tahapan kegiatan PPIP.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP
4. Menganalisis peran *stakeholder* dalam proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP
5. Merumuskan kesimpulan serta rekomendasi mengenai peran *stakeholder* dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis pemberdayaan masyarakat

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian tentang proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Kabupaten Tegal ini adalah :



#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi yang bekerja di pemerintahan khususnya pada Dinas Perkimtaru dan secara umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat praktis yang diharapkan meliputi :

1. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi *stakeholder* terkait khususnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengambil kebijakan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Hasil kesimpulan dan rekomendasi penelitian dapat menjadi referensi bagi program pemberdayaan yang sejenis.
3. Dalam konteks keilmuan dapat menambah wawasan bidang permukiman dan penataan ruang atau bidang ilmu lain yang terkait.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian yang merupakan kajian ilmiah dan aplikasi ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menjadi wacana dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk program pembangunan infrastruktur desa berbasis pemberdayaan masyarakat, selain itu dapat menjadi wacana bagi penelitian berikutnya.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk membatasi penelitian agar lebih fokus pada inti permasalahan penelitian, maka penelitian ini hanya melingkupi dua bagian yaitu : ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup materi memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dikaji dalam penelitian. Sedangkan ruang lingkup wilayah memberikan gambaran tentang lokasi penelitian dilaksanakan.

#### **1.5.1 Ruang Lingkup Materi**

Fokus materi pada penelitian ini adalah pada proses pemberdayaan masyarakat dan implementasi peran *stakeholder* pada kegiatan PPIP di Desa

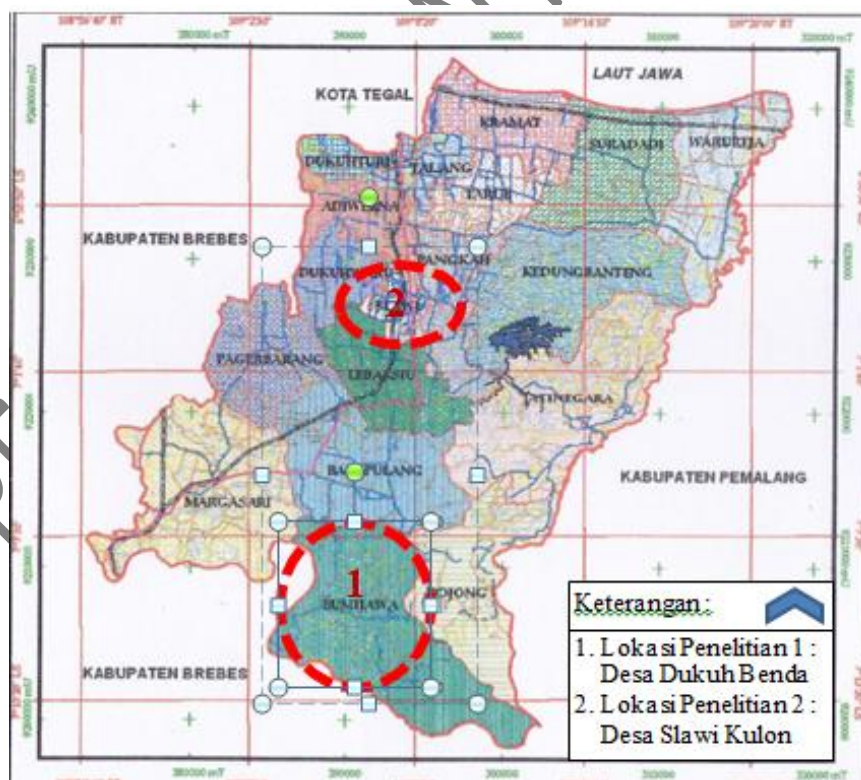
Dukuhbenda dan Desa Slawi Kulon Kabupaten Tegal. Adapun ruang lingkup materi penelitian ini disesuaikan dengan sasaran penelitian yang telah dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi *stakeholder* dan perannya dalam kegiatan PPIP di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa dan Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Pembahasan ini mencakup identifikasi *stakeholder* dalam kegiatan PPIP, serta mengetahui sejauh mana masing-masing *stakeholder* telah menjalankan perannya secara normatif. *Stakeholder* yang akan dibahas detail dalam penelitian ini adalah *stakeholder* pada kegiatan PPIP di tingkat kabupaten dan tingkat desa. Hal ini dilakukan atas pertimbangan *stakeholder* pada tingkat provinsi hanya sebatas penentu kebijakan umum kegiatan PPIP, tidak spesifik pada proses pemberdayaan masyarakat.
2. Mengidentifikasi proses pemberdayaan dalam setiap tahapan kegiatan PPIP. Tahapan kegiatan PPIP dalam penelitian hanya fokus pada tahapan di tingkat desa, karena di tingkat desa ini merupakan inti dari proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan disini dikaitkan dengan proses pemberdayaan model EPE (*Engagement-Participation-Empowerment*).
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP. Analisis ini dilakukan mengetahui tantangan apa yang dihadapi dalam proses pemberdayaan pada kegiatan PPIP, apa saja yang menjadi faktor internal dan eksternal proses pemberdayaan tersebut.
4. Menganalisis peran *stakeholder* dalam proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP. Analisis ini dilakukan untuk mengkaji peran *stakeholder* dikaitkan dengan fase/tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat di kedua lokasi penelitian. Sintesa hasil analisis ini dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi penelitian yang dapat menjadi referensi bagi program pemberdayaan yang sejenis.
5. Merumuskan kesimpulan, pandangan serta rekomendasi mengenai peran *stakeholder* dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tegal, sebagai masukan bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan program pembangunan yang

berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa secara berkelanjutan.

### 1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini meliputi desa penerima PPIP di Kabupaten Tegal tahun 2014 dan 2015, dalam hal ini khususnya pada Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa dan Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi. Pemilihan Desa Dukuhbenda dan Desa Slawi Kulon untuk pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada pertimbangan yaitu kedua desa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda karena yang satu berada di daerah pegunungan dan yang satunya berada di dataran rendah tepatnya di perkotaan. Peneliti mengambil lokasi dengan karakteristik yang berbeda agar dapat mendapatkan hasil yang lebih variatif sebagai perbandingan maupun untuk melengkapi kesimpulan penelitian. Adapun lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :



Sumber : Bappeda Kabupaten Tegal, 2012

**GAMBAR 1. 1**  
**LOKASI PENELITIAN**

## 1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan telah mempertimbangkan keberadaan penelitian yang telah ada sebelumnya (khususnya tesis dan skripsi). Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu dapat dilihat dalam Tabel I.1 berikut :

**TABEL I. 1**  
**KEASLIAN PENELITIAN**

Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian (Iqbal, 2007)	Memaparkan kajian tentang eksistensi berikut penelaahan pemangku kepentingan dalam implementasi program pembangunan pertanian	Deskriptif kualitatif	<p>1) Selama ini, pemangku kepentingan dalam implementasi program pembangunan pertanian tergolong sebagai penyandang dana, pelaksana kegiatan, organisasi pengawas dan advokasi, yang secara implisit adalah pemerintah. Sementara, peran pemangku kepentingan lain yang terkena dampak, baik positif (penerima manfaat) maupun negatif (di luar kesukarelaan), dari suatu kegiatan relatif kurang dilibatkan secara hakiki.</p> <p>2) Kunci dalam analisis pemangku kepentingan adalah Kepentingan (yakni berkaitan dengan harapan, manfaat, sumber daya, komitmen, potensi konflik, dan jalinan hubungan); dan Pengaruh (yakni berkaitan dengan kekuasaan terhadap kegiatan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap keputusan yang telah dibuat dan fasilitasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian, dan penanganan dampak negatifnya).</p> <p>3) Implementasi analisis pemangku kepentingan mencakup aspek identifikasi pemangku kepentingan, persepsi pemangku kepentingan, informasi dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi.</p>
Analisis Pemangku Kepentingan dalam Upaya Pemulihan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau Toba (Sundawati & Sanudin, 2009)	Memetakan para pihak yang berkepentingan dalam pemulihan ekosistem DTA Danau Toba serta mengkaji potensi konflik dan kolaborasi para pihak untuk mewujudkan suatu <i>collective action</i>	Deskriptif kualitatif, melalui wawancara semi terstruktur	<p>1) Pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemulihan ekosistem kawasan DTA Danau Toba dapat digolongkan sebagai pemangku kepentingan kunci, utama, dan pendukung.</p> <p>2) Pemangku kepentingan kunci merupakan lembaga pemerintah kabupaten yang tupoksinya berkaitan langsung dengan pemulihan ekosistem DTA Toba seperti Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup yang memiliki peranan yang paling tinggi dalam upaya pemulihan ekosistem</p>

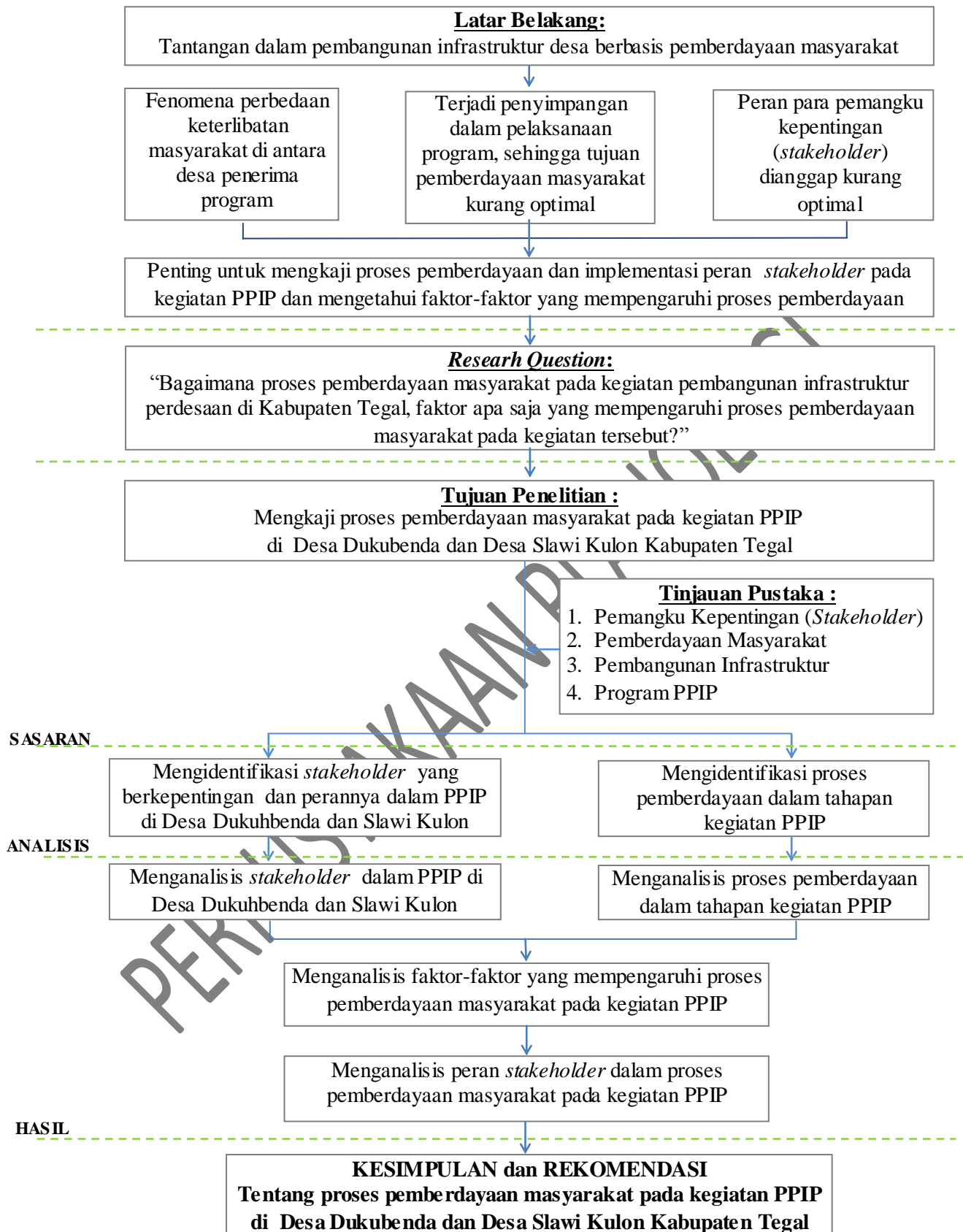
Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			DTA Toba. 3) Meski tidak terjadi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan yang mengemuka, namun terdapat potensi konflik di antara beberapa pemangku kepentingan. Selain itu ditemukan pula potensi kolaborasi antara beberapa pemangku kepentingan
Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembentukan Komunitas Guna Mencapai Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat (Kusumatantya, 2013)	Mengetahui bagaimana peran pemangku kepentingan dalam pembentukan komunitas guna mencapai ketahanan sosial ekonomi masyarakat siapa saja yang terlibat, apakah peran tersebut mempengaruhi keberlangsungan kelompok, dan bagaimana implikasinya terhadap ketahanan sosial ekonomi yang sedang berusah dibangun	Deskriptif kualitatif, melalui survei primer dengan teknik wawancara	1) Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembentukan dan pengembangan kelompok tabungan perumahan yaitu Bapermas, masyarakat, catur pilar (PKK, BKM, LPM, Kelurahan), dan dinas-dinas pendukung. 2) Peran pemangku kepentingan mempunyai pengaruh besar dalam proses pembentukan dan pengembangan kelompok. 3) Adanya disfungsi peran para pemangku kepentingan berdampak pada kerjasama dalam pengembangan kelompok menjadi stagnan dan berimplikasi melemahkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat yang sedang berusaha dibangun.
Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal (Nurfatriani, dkk, 2015)	Mengidentifikasi, membuat kategori dan menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub nasional dalam perumusan kebijakan fiskal hijau	Analisis pemangku kepentingan	1) Terdapat 18 pemangku kepentingan yang terdiri atas lima pemangku kepentingan kunci, tujuh pemangku kepentingan utama serta enam pemangku kepentingan pendukung. 2) Berdasarkan kategori pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal hijau yaitu sebagai key players, context setter, subject crowd dan maka perlu strategi untuk mengoptimalkan pengaturan pemangku kepentingan dalam perwujudan kebijakan fiskal hijau yaitu melalui peningkatan kolaborasi dan kerja sama antara dan subject key players yang memiliki tingkat kepentingan tinggi terhadap kebijakan fiskal hijau

Sumber : Analisis Penyusun, 2018

## 1.7 Kerangka Pikir

Sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut, maka diperlukan kerangka pikir yang akan memudahkan dalam melakukan proses penelitian dari awal hingga akhir. Penelitian diawali dengan adanya latar belakang berupa tantangan dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini yakni kegiatan PPIP. Fenomena adanya perbedaan keterlibatan masyarakat diantara desa penerima program, terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program yang menyebabkan proses pemberdayaan tidak berjalan sesuai harapan, dan kurang optimalnya peran para pemangku kepentingan, melatarbelakangi penulis untuk mengkaji proses pemberdayaan dan implementasi peran *stakeholder* pada kegiatan PPIP tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP. Penulis mengambil studi kasus di dua desa yang memiliki karakteristik yang berbeda yakni Desa Dukuhbenda yang memiliki ciri perdesaan dan Desa Slawi Kulon yang memiliki ciri perkotaan sebagai pembanding maupun pelengkap dari kesimpulan penelitian.

Peneliti kemudian menentukan metode penelitian untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian tersebut dan mengumpulkan teori-teori yang relevan serta melakukan observasi pada lokasi penelitian. Teori yang relevan yang digunakan yakni teori-teori tentang *stakeholder*, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan penjelasan terkait kegiatan PPIP. Wawancara mendalam terhadap pelaku dan pengguna hasil kegiatan juga dilakukan untuk mendukung kelengkapan data. Seluruh data yang diperoleh dianalisis untuk mendapat kesimpulan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dan implementasi peran pada kegiatan PPIP di wilayah penelitian serta apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam proses pemberdayaan tersebut. Untuk dapat memahami kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut :



**GAMBAR 1. 2**  
**KERANGKA PIKIR**

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Metode dan Strategi Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang mencoba untuk memahami secara holistik/menyeluruh persoalan pembangunan infrastruktur desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus penelitian ini dipertajam pada persoalan proses pemberdayaan masyarakat dan implementasi peran *stakeholder* khususnya pada program yang menjadi studi kasus yaitu PPIP. Upaya pemahaman tersebut dilakukan untuk menggiring penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu persoalan yang berhubungan dengan masalah sosial atau masalah kemanusiaan, atau dalam usaha mengurai kompleksitas suatu persoalan melalui cara pandang induktif dari tema khusus ke tema yang lebih umum (Creswell, 2014; Sugiyono, 2013). Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data dari informan, menganalisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data (Sugiyono, 2013). Implementasi pendekatan kualitatif pada penelitian ini, lebih ditekankan pada tindakan menggali informasi dari *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan PPIP, yang terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat termasuk identifikasi *stakeholder* serta peran *stakeholder* baik secara normatif maupun ideal.

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Yin (2012), metode penelitian studi kasus merupakan strategi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkenaan dengan *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa) pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus menurut Creswell (2014), adalah pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi kehidupan nyata, dengan sistem terbatas kasus atau berbagai kasus, melalui pengumpulan data yang mendalam dan detail dengan melibatkan beragam sumber informasi seperti pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen, dan



berbagai laporan. Herdiansyah (2014), menyebutkan bahwa salah satu ciri dari studi kasus adalah adanya sistem yang terbatas, yakni adanya batasan dalam hal waktu dan tempat serta batasan dalam hal kasus yang diangkat dapat berupa program, kejadian, aktivitas, atau subjek penelitian.

Eksplorasi data dalam penelitian studi kasus bergantung pada kasus yang dijadikan sebagai obyek penelitiannya. Dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat, terdapat perbedaan keterlibatan masyarakat antara desa satu dengan lainnya, sehingga dalam penelitian ini kasus yang diambil tidak hanya satu kasus. Peneliti mengambil dua kasus pada dua lokasi yang dapat mewakili perbedaan karakteristik masyarakat berdasarkan topografi wilayahnya yaitu lokasi di daerah pedesaan di pegunungan dan daerah perkotaan di daerah dataran rendah. Kasus lebih dari satu dapat digunakan sebagai pembandingan atau saling melengkapi. Pada penelitian ini, perbedaan dua kasus yang berbeda ini dikomparatifkan sebagai pembandingan untuk memperkaya hasil penelitian.

Penelitian yang menggunakan kasus lebih dari satu menurut Yin (2012), termasuk dalam jenis studi multi kasus (kasus jamak). Penggunaan kasus lebih dari satu dimaksudkan untuk mendapatkan data lebih detail, sehingga deskripsi hasil penelitian menjadi lebih terperinci dan terpercaya.

### **1.8.2 Proses Penelitian**

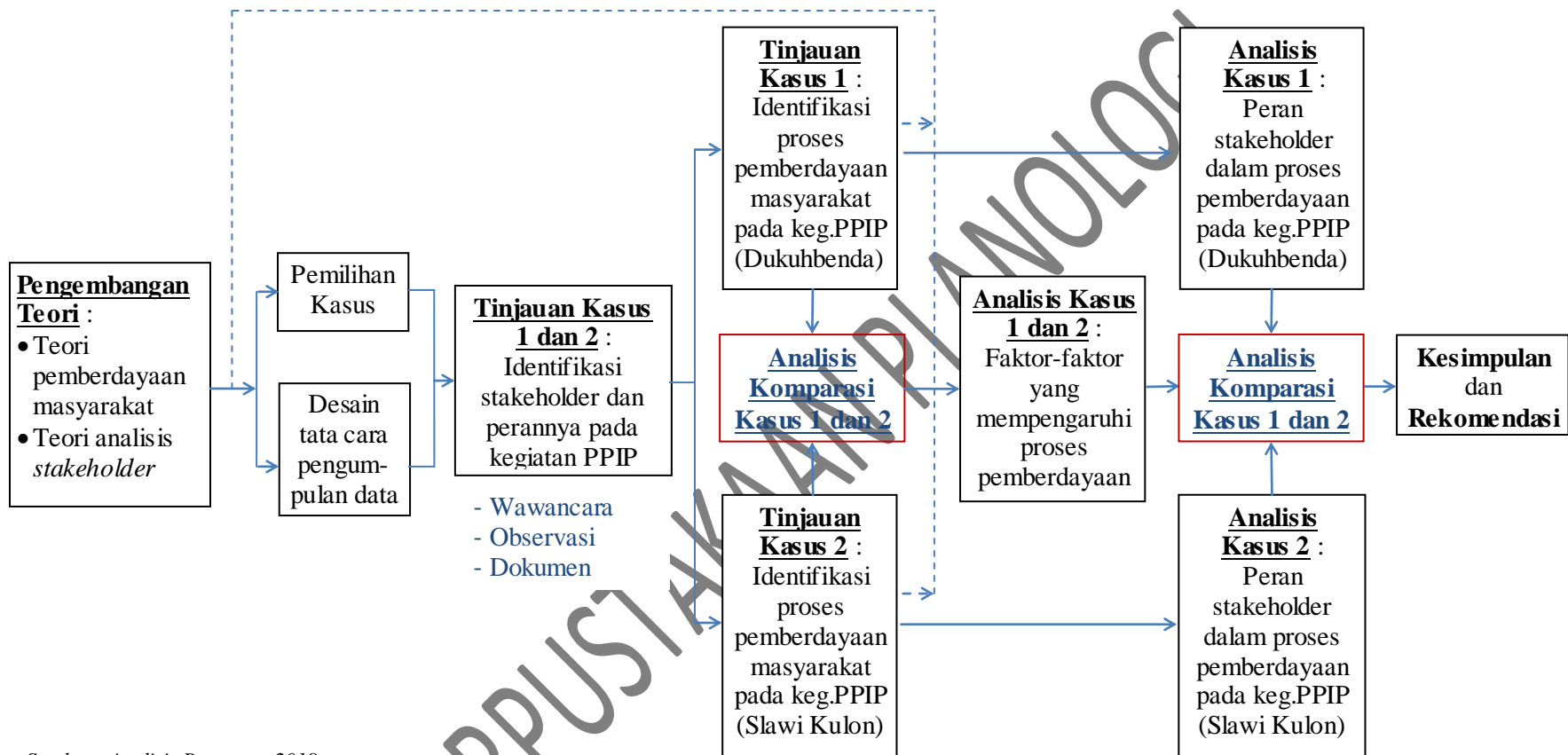
Proses penelitian ini mengikuti proses penelitian studi kasus yang dijelaskan oleh Yin (2012). Untuk penelitian studi multi kasus yang jumlah kasus dan unit analisisnya lebih dari satu, proses penelitiannya hampir sama dengan studi kasus tunggal. Perbedaannya adalah untuk studi multi kasus terdapat proses yang mengkaji, mengaitkan dan menyilangkan hasil kajian masing-masing kasus.

Proses pentahapan penelitian studi kasus dengan 2 kasus dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama Kasus 1 di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan penyusunan laporan sampai selesai, baru kemudian dilanjutkan untuk pengumpulan data pada kasus 2 di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi. Namun sebelum dilakukan pengumpulan data pada kasus 2, dilakukan peninjauan kisi-kisi

yang telah dibuat sebelum ke lapangan terlebih dahulu, karena dimungkinkan ada pengurangan atau penambahan kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga pengumpulan data di kasus 2 dilakukan dengan mengeksplorasi kisi-kisi penelitian yang telah diperbaiki dari kasus pertama. Setelah tahap pengumpulan data kemudian dilakukan pengolahan data dan penyusunan laporan.

Setelah tahap penyusunan laporan dua kasus selesai, kemudian dilakukan analisis terhadap semua kasus biasa disebut analisis komparasi. Analisis komparasi kasus ini dilakukan dengan cara mengkomparasi antara kasus 1 dan kasus 2. Dalam proses penelitian pada kasus kegiatan PPIP di kedua lokasi ini, prosesnya tidak benar-benar terpisah kasus 1 dan kasus 2, namun disesuaikan dengan hasil penelitian, ada beberapa analisis yang dibahas secara umum tanpa dipisah per kasus karena berlaku sama, ada pula yang dibahas per kasus karena terdapat perbedaan. Untuk lebih jelasnya tahapan proses penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut:

PERPUSTAKAAN PLANOLOGI



Sumber : Analisis Penyusun, 2018

**GAMBAR 1.3  
PROSES PENELITIAN**

### 1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer yang bersumber dari narasumber dan data sekunder sebagai pedukung bersumber dari dokumen dan laporan-laporan serta studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun yang menjadi sumber data utama adalah dari hasil wawancara terhadap narasumber. Adapun yang menjadi narasumber, teknik pengumpulan data, dan kebutuhan data dalam penelitian ini dijelaskan dalam sub bab berikut.

#### 1.8.3.1 Narasumber

Sugiyono (2013), menjelaskan dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu dan hasil kajiannya hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut, atau dapat ditransferkan ke tempat lain jika situasi sosial lain tersebut memiliki kesamaan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah narasumber/informan sebagai sumber informasi utama. Narasumber ini sebagai subyek yang dapat menginterpretasikan situasi, yang bisa merasakan dan melihat fakta dan kejadian yang terjadi selama kasus berlangsung.

Dalam penelitian ini sebagai narasumber adalah *stakeholder* yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan PPIP. *Stakeholder* ini adalah pelaku kegiatan PPIP di tingkat desa. Narasumber lainnya adalah tokoh masyarakat, fasilitator, dan tim pelaksana serta Satker yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan PPIP di kedua lokasi.

Penentuan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu memilih sumber informasi yang dianggap paling memahami dan mengetahui banyak informasi mengenai permasalahan dan memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan terhadap penelitian yang dilaksanakan, sementara teknik sampling yang digunakan adalah *maximum variation* dan *snowball*. *Maximum variation* merupakan proses menentukan beberapa orang sebagai informan kunci (*key informan*) untuk menggali informasi secara mendalam. Identifikasi narasumber sebagai informan kunci dilakukan dengan prinsip *snowballing* yakni dengan mencari informan yang paling tepat untuk

berdiskusi kemudian melakukan penggalian informasi dari *key informant* pada salah satu *stakeholder* dan menggeling ke informan lainnya sampai kebutuhan peneliti tercukupi. *Stakeholder* kunci pertama sebagai pembuka jalan bagi proses *snowball sampling* adalah Kepala Satker PIP Kabupaten Tegal yang ada di Dinas Permukiman dan Tata Ruang. *Stakeholder* di tingkat kabupaten untuk kedua lokasi penelitian adalah sama, karena kewenangan *stakeholder* PPIP di tingkat kabupaten melingkupi keempatbelas desa penerima manfaat di kabupaten Tegal. Sedangkan *stakeholder* pelaksanaan PPIP di tingkat desa berbeda-beda sesuai desa masing-masing. Dalam penelitian ini *key informant* sebagai subjek penelitian dapat merupakan perwakilan dari masing-masing *stakeholder* yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, *stakeholder* kunci, pendukung dan utama. Pengelompokan *stakeholder* dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut :

**TABEL I. 2**  
**SUBYEK PENELITIAN SEMENTARA**

<i>Stakeholder Kunci</i>	<i>Stakeholder Utama</i>	<i>Stakeholder Penunjang</i>
* Dinas Permukiman & Tata Ruang (Dinas Perkintaru)	* Organisasi Masyarakat Desa (OMS)	* Fasilitator Masyarakat (FM)
* Bappeda	* Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)	* Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK)
* Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes)	* Kader Desa (KD)	* Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
		* Kepala Desa

*Sumber : Analisis penyusun, 2018*

Narasumber di kedua lokasi penelitian terdiri dari fasilitator masyarakat yang mendampingi pelaksanaan PPIP di desa tersebut; pelaksana program dalam hal ini OMS (organisasi masyarakat setempat), KD (kader desa) dan KPP (kelompok pemanfaat dan pemelihara); tokoh masyarakat; dan masyarakat penerima manfaat. Tokoh masyarakat di sini terdiri dari kepala desa, aparat desa yang terlibat pada waktu kegiatan berlangsung, perwakilan BPD (badan permusyawaratan desa) dan tokoh masyarakat lain yang terlibat dalam proses

kegiatan PPIP. Sedangkan masyarakat penerima manfaat yang berpotensi sebagai narasumber adalah masyarakat yang berperan serta aktif selama kegiatan PPIP berlangsung, dan masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan fisik kegiatan PPIP.

Jumlah narasumber dalam penelitian ini bersifat fleksibel tidak dibatasi, jika dari hasil *snowballing* ternyata dibutuhkan *stakeholder* lain selain hasil literatur agar informasi lebih utuh, tidak menutup kemungkinan untuk ditambah atau sebaliknya jika ada *stakeholder* dinyatakan tidak relevan maka akan dieliminasi. Penambahan narasumber dihentikan jika data yang diperoleh sudah jenuh, yakni saat informasi dari berbagai narasumber tidak memberikan data yang baru lagi, jawaban yang diberikan hampir sama atau berulang dan dapat menjawab tujuan penelitian. Tuntasnya perolehan informasi dalam penelitian kualitatif adalah dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sampel sumber data (Sugiyono, 2013).

### **1.8.3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang muncul (Creswell, 2014). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Afrizal (2016), menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik berupa hasil pengamatan (observasi) maupun melalui informasi dari informan dalam proses wawancara atau diskusi terbatas lainnya. Sedangkan data sekunder merupakan kumpulan data yang berupa dokumen yang digunakan sebagai pelengkap dan alat kontrol pengujian informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

#### **1. Pengumpulan Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber sebagai informan yang menjadi subyek penelitian dan observasi lapangan. Bentuk data primer diperoleh baik dalam bentuk bahasa verbal dan non verbal serta perilaku dari narasumber yang diamati dan diwawancarai peneliti.

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Merupakan kegiatan mewawancarai personil yang dipilih sebagai sumber informasi atau informan yang tentunya telah dikualifikasi sebagai orang paling layak untuk memberikan informasi terkait data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan pada semua narasumber yang dipilih dari hasil identifikasi *stakeholder* yang dianggap mewakili kepentingan kelompoknya.

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan narasumber dengan cara mendatangi kediamannya satu persatu. Peneliti menggunakan panduan wawancara berupa kisi-kisi penelitian yang telah dirumuskan dari kajian pustaka sebagai pengingat terhadap pertanyaan penelitian dan mengarahkan peneliti agar terfokus sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan perekaman pembicaraan selama wawancara setelah mendapatkan ijin dari narasumber. Peneliti berusaha menjaga wawancara sebagai *open-ended* selama narasumber memberi informasi yang relevan dengan penelitian, dan menutup sesi wawancara dengan menanyakan kembali kesediaan narasumber untuk dihubungi atau didatangi kembali jika peneliti masih mempunyai pertanyaan lanjutan.

Wawancara diawali dengan narasumber dari kepala Satker PIP Kabupaten Tegal saat pelaksanaan PPIP tahun 2014-2015 lalu yang dulu menjabat kasie tata bangunan dan perumahan permukiman bidang Cipta Karya DPU, namun sekarang beliau menjabat sebagai kasie perencanaan bidang bangunan gedung Dinas Perkimtaru. Dari informasi yang didapat dari Kepala Satker, peneliti diarahkan untuk melanjutkan wawancara dengan Timlak Kabupaten, baru dilanjutkan ke desa yang menjadi lokasi penelitian. Adapun metode wawancara yang dilakukan di kedua lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

1) Wawancara terhadap narasumber di Slawi Kulon

Metode yang digunakan untuk memilih narasumber adalah metode *snowballing* (metode bola salju). Narasumber kunci pertama adalah fasilitator masyarakat (FM) yang mendampingi PPIP di Desa Slawi Kulon saat itu, karena fasilitator memiliki banyak informasi terkait siapa-siapa

saja yang menjadi kepala desa, OMS, KPP, KD, BPD serta masyarakat yang terlibat langsung dalam program. Namun tidak semua narasumber mau diwawancarai karena alasan kesibukan pekerjaan, sudah pindah rumah dan ada juga yang menolak. Beberapa data sekunder peneliti dapatkan dari kantor baladesa dan BKM desa Slawi Kulon.

## 2) Wawancara terhadap narasumber di Dukuhbenda

Narasumber kunci pertama untuk mendapatkan informasi di Desa Dukuhbenda adalah fasilitator masyarakat yang mendampingi PPIP di desa tersebut. Karena letak desa yang di daerah pegunungan dengan jarak tempuh cukup jauh, untuk mempermudah dalam pelaksanaan wawancara, peneliti melalui FM terlebih dahulu menghubungi kepala desa untuk menginformasikan terlebih dahulu rencana wawancara, sehingga saat peneliti datang ke lokasi narasumber yang akan diwawancarai sudah siap. Wawancara dengan kepala desa dilakukan di ruang kerja kades di balai desa. Setelah selesai wawancara dengan pak kades dilanjutkan wawancara dengan anggota KPP dan OMS, yang kebetulan saat ini menjadi perangkat desa, sehingga wawancara dilakukan sekalian di balai desa. Sedangkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga yang terlibat langsung dilakukan di rumah masing-masing.

## b. Observasi Lapangan

Creswell (2014) dengan mengutip pernyataan Angrosino (2007) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indera peneliti dengan menggunakan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Pada dasarnya, tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut. Observasi lapangan sifatnya pendukung data yang telah diceritakan oleh narasumber.



## 2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan penunjang data primer. Pengumpulan datanya berasal dari instansi, laporan kegiatan atau studi yang pernah dilakukan sebelumnya jika ada. Bentuk data sekunder berupa dokumen yang berupa buku-buku sebagai kepastakaan ilmiah yang berkaitan dengan peran *stakeholder* dan aktivitas pemberdayaan masyarakat. Data sekunder ini sifatnya untuk melengkapi atau mendukung beberapa informasi yang diberikan oleh narasumber. Sumber data berasal dari instansi terkait yaitu Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Bappeda, Kelurahan, Satker PIP tingkat provinsi dan kabupaten, BPS Kabupaten Tegal serta Konsultan manajemen pendamping.

### 1.8.3.3 Kebutuhan Data

Tabel kebutuhan data merupakan daftar data yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan survei primer maupun survei sekunder. Data yang diperoleh melalui survei primer maupun survei sekunder digunakan sebagai input dalam tahapan analisis. Tabel kebutuhan dalam penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada Tabel I.3 berikut :

**TABEL I. 3**  
**KEBUTUHAN DATA PENELITIAN**

No	Sasaran	Kebutuhan Data dan Informasi	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
1	<b>Mengidentifikasi stakeholder dan perannya dalam PPIP</b>	<p><i>Stakeholder</i> yang berperan dalam kegiatan PPIP, dengan dikelompokkan menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>stakeholder</i> utama</li> <li>* <i>stakeholder</i> kunci</li> <li>* <i>stakeholder</i> penunjang</li> </ul>	Primer dan Sekunder	Telaah dokumen dan wawancara serta teknik <i>snowball</i> dalam memilih informan terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dinas Perkimtaru</li> <li>* <i>Stakeholder</i> terkait</li> </ul>
2	<b>Mengidentifikasi proses pemberdayaan dalam setiap tahapan PPIP</b>	<p>Proses pemberdayaan dalam tiap tahap PPIP dikaitkan dengan proses pemberdayaan model EPE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Tahap Persiapan</li> <li>* Tahap Perencanaan</li> <li>* Tahap Pelaksanaan Fisik</li> </ul>	Primer	Wawancara	* <i>Stakeholder</i> terkait

No	Sasaran	Kebutuhan Data dan Informasi	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
		* Tahap Pasca Pelaks. Fisik			
3	<b>Menganalisis faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat</b>	* Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mau terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat	Primer	Wawancara	* <i>Stakeholder</i> terkait dan masyarakat yang terlibat langsung
4	<b>Menganalisis peran stakeholder dalam proses pemberdayaan masyarakat</b>	* Peran stakeholder dalam proses pemberdayaan masyarakat merujuk pada empat fase pemberdayaan model EPE (Engagement-Participation-Empowerment)  * Harapan/peran ideal untuk masing-masing <i>stakeholder</i>	Primer	Wawancara	* <i>Stakeholder</i> terkait dan masyarakat yang terlibat langsung

Sumber : Analisis Penyusun, 2018

## 1.8.4 Pengolahan Data dan Teknik Analisis

### 1.8.4.1 Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan tahap penting yang perlu dilakukan sebelum melakukan analisis data. Pengolahan data dilakukan terhadap data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun sekunder. Langkah awal dalam penelitian adalah dengan membuat catatan lapangan yang rinci dan lengkap berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi maupun dokumen yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan review secara menyeluruh dan cepat untuk mendapatkan kesan / gambaran tentang isi keseluruhan dokumen yang akan dianalisis. Setelah itu pelajari satu persatu dokumen secara teliti untuk menemukan kata-kata penting, simbol-simbol, argumen, kejadian yang relevan dengan tujuan peneliti, atau hal-hal dalam catatan lapangan yang muncul berkali-kali, kemudian tandai temuan penting tersebut dengan kode atau label untuk mengkategorikannya dalam beberapa tema. Pemberian kode (*coding*) bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menemukan secara cepat beberapa hasil wawancara melalui pemilahan, pengelompokkan dan klasifikasi berdasarkan kode.

Berikut cara pemberian kode hasil wawancara dengan narasumber di dua lokasi kasus :

**Sat/W2/D/20012018/51-55** dimana,

Sat = Satker (kode *stakeholder* yang menjadi narasumber, misal FM untuk Fasilitator, TL untuk Tim Pelaksana, dst)

W2 = Wawancara ke-2

D = Desa Dukuhbenda, S untuk Desa Slawi Kulon

20-01-2018 = tanggal wawancara dilakukan

51-55 = menunjukkan lokasi baris dalam verbatim (baris ke 51 hingga 55)

Pemberian kode (*coding*) hasil wawancara tersebut dapat digambarkan secara visual dalam contoh bentuk tabel hasil wawancara sebagaimana Gambar 1.4 dibawah ini :

**VERBATIN WAWANCARA A.3**

Nama Responden :  
 Jabatan : Ketua OMS Program PPIP 2014-2015 Desa Slawi Kulon  
 Pekerjaan Sekarang :  
 Hari/Tanggal : Kamis/08-02-2018  
 Pukul :  
 Lokasi :  
 Kode : OMS/W3/S/08022018

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
1	Peneliti : Narasumber :	..... .....	.
5			

  : Kode *stakeholder* yang menjadi narasumber

  : Kode wawancara ke-

  : Kode desa

  : Kode tanggal wawancara dilakukan

Sumber : Analisis Penyusun, 2018

**GAMBAR 1. 4**  
**CONTOH BENTUK TABEL HASIL WAWANCARA**

Data yang sudah teridentifikasi, kemudian dikelompok-kelompokkan sehingga dapat diketahui data mana yang masuk ke dalam kategori tertentu, dan data mana saja yang masuk dalam kategori lainnya. Kategorisasi dilakukan berdasarkan kesamaan tematik dan substansi. Setelah pemberian kode pada data dalam bentuk teks, kemudian memeriksa teks untuk mencari tema yang berulang yang disesuaikan dengan tujuan penelitian hingga peneliti menemukan beberapa tema kunci.

Hasil wawancara kemudian dipilih kata-kata kuncinya kemudian dikelompokkan dengan memberi tanda (*highlight*) pada kata kuncinya. Setelah memberi *highlight* pada hasil wawancara, peneliti mengelompokkan kata-kata kunci atau sub-sub tema menjadi tema tertentu. Langkah selanjutnya yakni pengelompokkan tema berdasarkan kesamaan tematik dan pola substansi sesuai dengan kebutuhan analisis. Hal yang penting dalam tahapan ini adalah pemberian nomor urutan baris yang menunjukkan letak kalimat kunci yang telah diberi *highlights* ke dalam kode yang telah dibuat.

#### **1.8.4.2 Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan untuk strategi pendekatan studi kasus dalam penelitian ini dengan deskriptif kualitatif. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian pada kedua kasus digunakan teknik analisis komparasi kasus. Teknik komparasi kasus ini dilakukan untuk melihat keterkaitan diantara kedua kasus sehingga dapat membandingkan atau menggabungkan antara dua kasus yang memiliki beberapa elemen yang berbeda. Yin (2012), mendefinisikan analisis komparasi kasus sebagai analisis yang dilakukan dengan mengkaitkan antara deskripsi hasil analisa kasus yang satu dengan kasus yang lain. Analisis komparasi kasus didahului dengan analisis terhadap masing-masing kasus terlebih dahulu dengan cara mengkaitkan tema-tema yang diperoleh. Analisis terhadap masing-masing kasus terlebih dahulu dilakukan untuk menjawab sasaran penelitian sebagai berikut :

### 1. Identifikasi *stakeholder* dalam kegiatan PPIP

Tahap awal proses identifikasi *stakeholder* dilakukan melalui studi literatur dan informasi dari berbagai sumber untuk mengetahui gambaran *stakeholder* dalam kegiatan PPIP secara umum. Identifikasi *stakeholder* dilakukan untuk mengetahui aktor yang terlibat dalam kegiatan PPIP di kedua lokasi penelitian. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan dalam proses identifikasi *stakeholder* menurut Reed et al. (2009), yaitu FGD (*Focus Group Discussion*), wawancara semi terstruktur, dan cara *snowball sampling*. Dalam penelitian ini identifikasi *stakeholder* dalam kegiatan PPIP dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur dan *snowball sampling*. Kemudian setelah *stakeholder* teridentifikasi, kemudian dikelompokkan menjadi tiga kelompok menurut Crosby (1991), yaitu 1) *stakeholder* kunci, 2) *stakeholder* utama, dan 3) *stakeholder* pendukung.

Setelah semua *stakeholder* teridentifikasi, dilakukan identifikasi peran *stakeholder*. Identifikasi peran dilakukan dengan mengklasifikasikan peran yang dapat dijalankan oleh *stakeholder* ke dalam lima peran menurut Nugroho, et.al. (2014), yakni sebagai *policy creator* (pembuat kebijakan dan aturan), koordinator, fasilitator, implementator (pelaksana program), dan akselerator (mendorong percepatan pencapaian tujuan program). Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing *stakeholder* telah menjalankan peran dalam kegiatan PPIP secara normatif dan harapan akan peran yang semestinya dijalankan masing-masing *stakeholder* secara ideal sesuai tahapan dalam kegiatan PPIP.

### 2. Identifikasi proses pemberdayaan dalam setiap tahapan kegiatan PPIP

Identifikasi proses pemberdayaan dilakukan terlebih dahulu mengidentifikasi apa saja aktivitas yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan PPIP. Identifikasi dilakukan dengan telaah dokumen dan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil identifikasi aktivitas pemberdayaan ini kemudian akan dianalisis untuk mengetahui proses pemberdayaan dikaitkan dengan empat fase pemberdayaan dalam model EPE (*Engagement – Participation – Empowerment*). Istilah endogen (dari dalam) dalam hal ini adalah endogen dari sisi *stakeholder* utama yaitu pihak yang terkena

dampak program secara langsung, sehingga kelompok *stakeholder* lainnya merupakan eksogen.

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP

Analisis ini dilakukan mengetahui tantangan apa yang dihadapi dalam proses pemberdayaan pada kegiatan PPIP, apa saja yang menjadi faktor internal dan faktor eksternal proses pemberdayaan tersebut. Eksplorasi data dan informasi dilakukan melalui telaah dokumen yang menyangkut tata cara pelaksanaan program dan wawancara mendalam dengan informan terpilih.

4. Menganalisis peran *stakeholder* dalam proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP

Analisis ini dilakukan untuk mengkaji peran *stakeholder* dikaitkan dengan fase/tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan program. Teknik analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana penyusunan kajian peran *stakeholder* dalam proses pemberdayaan didapatkan dari hasil identifikasi *stakeholder* dan perannya dalam kegiatan PPIP dan hasil identifikasi proses pemberdayaan dalam setiap tahapan PPIP. Selanjutnya peran *stakeholder* tersebut dikaitkan dengan fase/tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat di masing-masing lokasi penelitian.

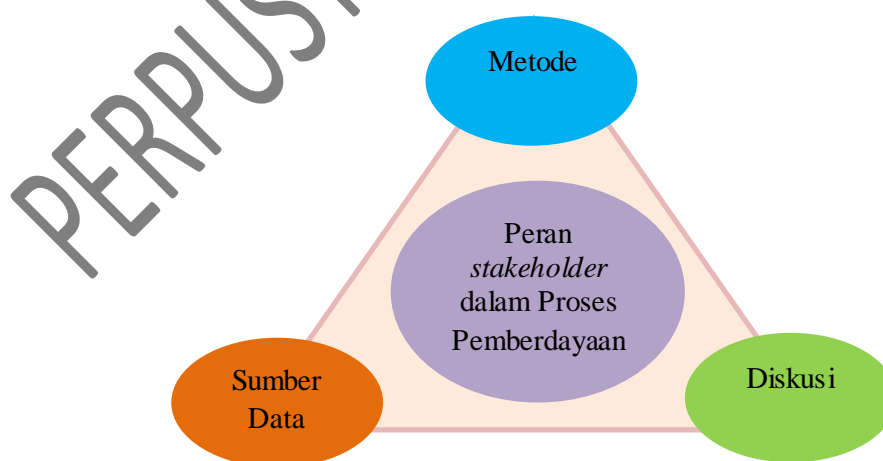
Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tegal secara umum dan untuk merumuskan kajian peran *stakeholder* yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dilakukan **analisis komparasi kasus** dengan cara mengkomparasi analisis yang telah dilakukan di kedua lokasi penelitian dengan mengkaitkan antara deskripsi hasil analisa kasus di Desa Dukuhbenda dengan kasus di Desa Slawi Kulon.

### 1.8.5 Keabsahan Data

Keabsahan data dari hasil wawancara terhadap narasumber merupakan aspek yang signifikan dan menjadi bagian yang penting. Keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara **Triangulasi**, dengan pengecekan data dari informan-informan yang berbeda atau dari sumber data yang berbeda. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.

Triangulasi merupakan upaya untuk memvalidasi temuan penelitian dengan membandingkan jenis data yang berbeda, dan perspektif narasumber yang berbeda. Metode triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengujian sumber data (informan kunci), diskusi dan metode. Perbandingan asumsi antara *stakeholder* dilakukan dengan membandingkan asumsi informan kunci baik secara terpisah (sumber data). Hasil wawancara dengan Satker dibandingkan dengan hasil wawancara dengan fasilitator, tokoh masyarakat, OMS atau masyarakat yang terkena dampak PPIP. Perbandingan asumsi juga dilakukan antar kelompok informan kunci (diskusi). Hasil wawancara dengan ketua OMS dibandingkan dengan hasil wawancara anggota OMS lainnya. Pengujian juga dilengkapi dengan pengujian metode yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dengan telaah dokumen. Semakin banyak yang mendukung sebuah asumsi, maka validitas temuan semakin tinggi dan sebaliknya. Teknik triangulasi dalam penelitian dapat digambarkan seperti Gambar 1.5 berikut :



Sumber : Analisis Penyusun, 2018

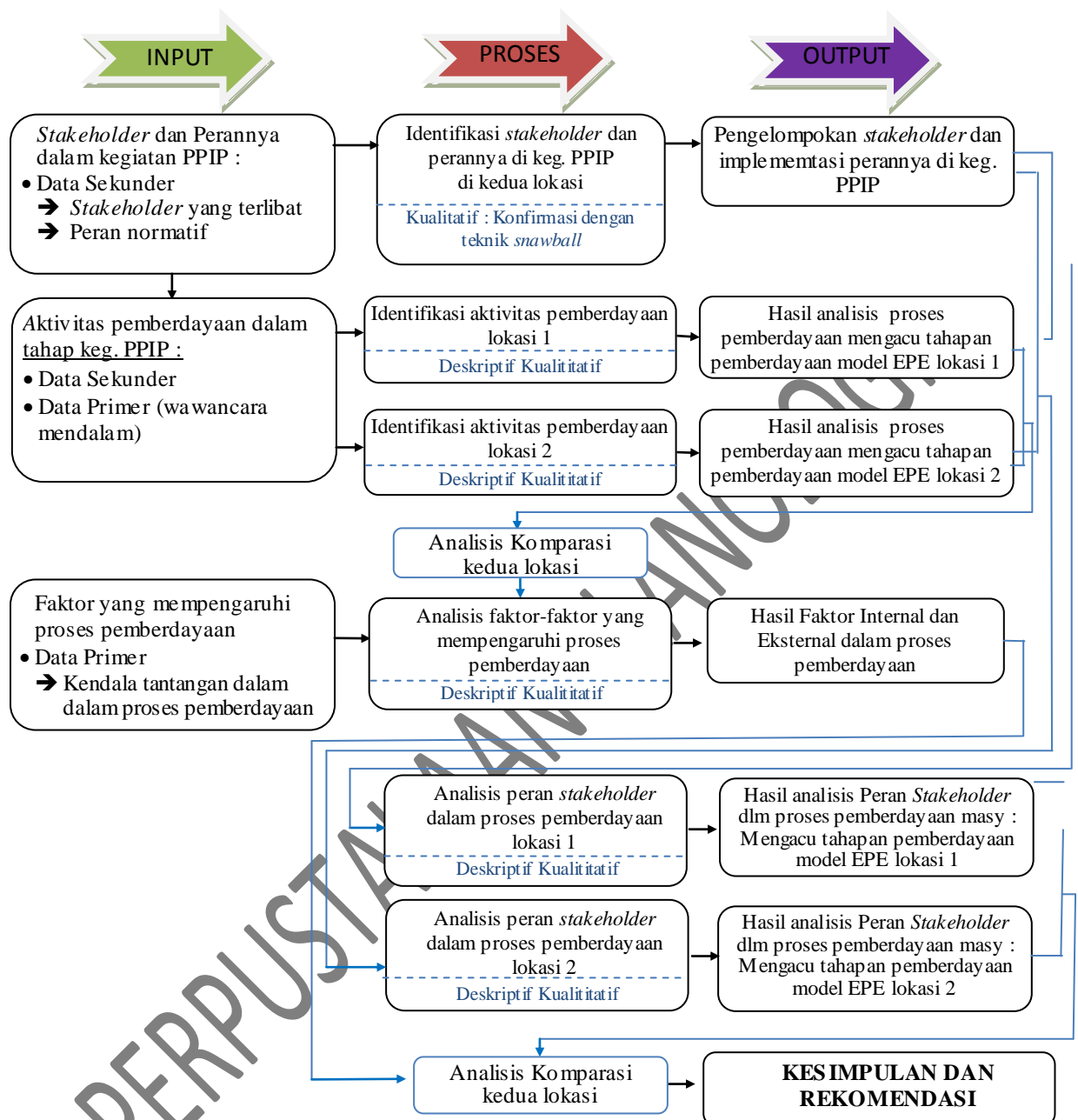
**GAMBAR 1.5**  
**TEKNIK TRIANGULASI DATA DALAM PENELITIAN**

Beberapa pendapat maupun informasi dari narasumber yang sering muncul dicocokkan dengan informasi dari narasumber yang lain. Apabila informasi tersebut sama, maka informasi tersebut dapat dikatakan valid dan dapat diolah atau dianalisis. Selain itu kebasahan informasi juga dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan. Sebagai contoh untuk metode pencocokkan pola antara hasil wawancara dengan masyarakat terdampak langsung dicocokkan dengan narasumber lainnya baik itu OMS, KPP dan fasilitator. Kemudian informasi tersebut dicocokkan dengan informasi dari narasumber dari desa lain maupun dari instansi.

#### **1.8.6 Kerangka Analisis**

Kerangka analisis bertujuan untuk menunjukkan setiap tahapan analisis dalam penyusunan laporan ini sebagaimana telah dijelaskan secara detail dalam teknik analisis. Kerangka analisis ditunjukkan pada Gambar 1.6 sebagai berikut:





Sumber : Analisis penyusun, 2018

**GAMBAR 1. 6**  
**KERANGKA ANALISIS PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI**  
**KABUPATEN TEGAL**

## 1.9 Definisi Operasional

Agar diperoleh pengertian yang sama khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta untuk menghindari perbedaan persepsi, berikut beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini :

### 1. Stakeholder

*Stakeholder* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemangku kepentingan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan PPIP di Desa Dukuhbenda dan Desa Slawi Kulon Kabupaten Tegal tahun anggaran 2014-2015.

### 2. Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dimaksud adalah serangkaian proses individu maupun kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yakni memperoleh kontrol lebih atas usaha perbaikan kehidupan mereka dengan mendefinisikan masalah, mengidentifikasi, merencanakan solusi, melaksanakan program hingga melakukan pemeliharaan / pengelolaan terhadap infrastruktur terbangun hasil program.

### 3. Endogen

Endogen adalah yang berasal dari dalam (internal). Yang dimaksud aktor endogen dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkena dampak program secara langsung yaitu masyarakat.

### 4. Eksogen

Eksogen adalah yang berasal dari luar (eksternal). Yang dimaksud aktor eksogen dalam penelitian ini adalah pemangku kepentingan diluar aktor endogen.

## 1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang melandasi tema penelitian terutama di wilayah studi. Latar belakang menjadi dasar perumusan masalah, tujuan, sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah yang dikaji, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN**

Pada Bab ini dikemukakan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu tentang peran *stakeholder*, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP). Pada bagian akhir bab ini akan disajikan sintesa literatur yang merupakan gambaran keterkaitan masing-masing literatur yang telah dibahas, serta kisi-kisi penelitian sebagai kerangka eksplorasi data dalam mencapai tujuan dan sasaran penelitian.

## **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI**

Bab ini menggambarkan secara umum lokasi penelitian yang meliputi gambaran umum Kabupaten Tegal, gambaran umum program PIIP, tinjauan lokasi 1 (Desa Dukuhbenda) dan tinjauan lokasi 2 (Desa Slawi Kulon).

## **BAB IV ANALISIS PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI KABUPATEN TEGAL**

Pada bab ini menyajikan pembahasan identifikasi *stakeholder* dan perannya dalam kegiatan PIIP, identifikasi proses pemberdayaan dalam setiap tahap PIIP, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan, serta analisis peran *stakeholder* dalam proses pemberdayaan pada kegiatan PIIP di Kabupaten Tegal.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan rekomendasi terkait dengan proses pemberdayaan dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tegal.



PERPUSTAKAAN PLANOLOGI

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN**

#### **2.1 Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)**

Pemangku kepentingan atau biasa disebut *Stakeholder* didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu (Mitchell et al., 1997) atau siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan (Gonsalves et al., 2005). *Stakeholder* juga dapat diartikan seseorang, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam kebijakan yang dipromosikan (Schmeer, 2000). Mereka dapat berupa organisasi, komunitas, kelompok sosial ekonomi, pemerintah, atau lembaga yang berasal dari berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat (Iqbal, 2007).

Dalam implementasi program pembangunan, *stakeholder* memiliki definisi yang beraneka ragam. Istilah pemangku kepentingan digunakan untuk mendeskripsikan komunitas atau organisasi yang secara permanen menerima dampak dari aktivitas pembangunan atau kebijakan, di mana mereka berkepentingan terhadap hasil aktivitas pembangunan atau kebijakan tersebut. Hal ini perlu disadari, mengingat dampak yang diterima masyarakat tidak selalu adil. Ada masyarakat yang mungkin menanggung biaya sedangkan sebagian masyarakat lainnya justru memperoleh manfaat dari aktivitas pembangunan atau kebijakan tersebut (Race & Millar, 2008).

Secara garis besar, Crosby (1991) mengelompokkan *stakeholder* menjadi tiga kelompok sebagai berikut :

1. *Stakeholder* kunci, yaitu pihak yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.
2. *Stakeholder* utama, yaitu pihak yang menerima dampak positif atau negatif dari suatu kegiatan.
3. *Stakeholder* penunjang, yaitu pihak yang menjadi perantara dalam proses penyampaian kegiatan. Kelompok ini dapat digolongkan atas pihak

penyandang dana, pelaksana, pengawas, organisasi advokasi seperti LSM, organisasi pemerintahan dan pihak swasta. *Stakeholder* ini bisa perorangan atau kelompok kunci yang mempunyai kepentingan formal maupun informal.

Pengklasifikasian *stakeholder* dapat juga dibedakan menjadi *stakeholder* sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sipil. Namun dalam implementasinya secara umum bisa dianggap sama dengan klasifikasi menurut Crosby diatas, dimana sektor publik merupakan *stakeholder* kunci, sektor swasta sebagai *stakeholder* penunjang dan masyarakat sipil sebagai *stakeholder* utama (Kusumatantya, 2013). Berbeda dengan pendapat Kessler et al. (2017), *stakeholder* diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan sifatnya yaitu *stakeholder* aktif yaitu mengacu pada kelompok yang memiliki keterlibatan finansial langsung, dan *stakeholder* pasif yang mengacu pada kelompok yang tidak memiliki keterlibatan finansial langsung dengan aktivitas/program. Dari berbagai pengklasifikasian tersebut diatas dapat dikatakan secara umum memiliki kemiripan, hanya berbeda dalam pemberian nama klasifikasinya saja, selanjutnya dalam penelitian ini klasifikasi yang digunakan yaitu klasifikasi berdasarkan pendapat Crosby yaitu *stakeholder* utama, pendukung dan kunci.

Pemahaman peran masing-masing *stakeholder* tidak lepas dari proses analisis *Stakeholder*. Analisis *stakeholder* merupakan suatu proses mengidentifikasi individu, kelompok, dan organisasi yang dipengaruhi atau dapat mempengaruhi lingkungan dan generasi yang akan datang serta memprioritaskan individu-individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Reed et al., 2009). Rangkaian analisis yang dilakukan meliputi 1) identifikasi pemangku kepentingan, 2) mengelompokkan dan mengkategorikan pemangku kepentingan, dan 3) menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan. Analisis *stakeholder* diperlukan untuk mengidentifikasi aktor kunci dan aktor pendukung dari segi pengetahuan, minat, posisi, aliansi dan kepentingannya terhadap suatu kebijakan atau program. Selain itu Analisis *stakeholder* digunakan untuk mengidentifikasi aktor atau komunitas yang paling terdampak dari suatu program (Race & Millar, 2008). Ada dua hal penting dalam menganalisis *stakeholder* menurut Crosby (1991), yakni 1) *interest* (kepentingan) dan 2) *influence* (pengaruh).